



Strategi Humas Dalam Mempertahankan Citra Bssn Pasca Terjadinya Kebocoran Data

Rivaldi Eka Saputra¹, Wildan Putra Ghifari²

^{1,2}Program Studi Hubungan Masyarakat, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Yogyakarta

*Email Penulis korespondensi: saputrarivaldieka17@gmail.com

Abstrak

Kejahatan siber telah menjadi ancaman di berbagai kehidupan manusia sehingga sulit untuk menanganinya, hal ini merukan akibat pesatnya perkembangan teknologi informasi di Indonesia. oleh karena itu Badan Siber dan Sandi Negara sebagai lembaga resmi negara yang bertugas menjaga keamanan siber negara Indonesia menjadi perhatian masyarakat karena dianggap tidak mampu menjaga data pribadi masyarakat Indonesia yang mudah di akses. Sehingga masyarakat tidak puas dengan kinerja badan siber dan sandi negara. Di tambah tingkat kepuasan masyarakat Indonesia terhadap badan siber dan sandi negara menurun dari 82,1 turun ke nilai 76,54. Maka dari itu di perlukanya peran hubungan masyarakat sebagai penjaga dan pengembalian nama baik Badan Siber dan Sandi negara yang tercemar akibat dampak kebocoran data masyarakat. Dalam rangka pengembalian dan penjagaan nama baik sebuah instansi atau lembaga seorang Public relations maka diperlukannya sebuah strategi yang dapat digunakan untuk hal tersebut. Adapun strategi yang di gunakan adalah seperti By serving the media (pelayanan kepada media), By establishing a reputations for reliability (menegakkan reputasi perusahaan agar tetap di percaya), By supplying good copy (memasok naskah informasi yang baik), By providing verification facilities (menyediakan fasilitas.).

Kata kunci: Hacker, kebocoran data, kepercayaan masyarakat, cyber crime, public relations , badan siber dan sandi negara.

Abstract

Cybercrime has become a threat to various human lives, making it difficult to deal with it, this is due to the rapid development of information technology in Indonesia. Therefore, the National Cyber and Crypto Agency as the official state institution tasked with maintaining Indonesia's state cybersecurity is of concern to the public because it is considered incapable of protecting the personal data of the Indonesian people which is easy to access. So that people are dissatisfied with the performance of the state cyber and cipher agency. In addition, the level of satisfaction of the Indonesian people with the state cyber and cipher agency decreased from 82.1 to 76.54. Therefore, the role of public relations is needed as the guardian and restoration of the good name of the State Cyber and Crypto Agency which has been tainted due to the impact of public data leaks. In order





to restore and maintain the good name of a public relations agency or institution, a strategy is needed that can be used for this. The strategies used are such as By serving the media (services to the media), By establishing a reputation for reliability (upholding the company's reputation so that it remains trusted), By supplying good copy (supplying good information scripts), By providing verification facilities (provide facilities.).

Keyword: *Hackers, data leaks, public trust, cyber crime, public relations, cyber agencies and state ciphers.*

Pendahuluan

Terbukanya suatu informasi merupakan hal yang baik bagi masyarakat luas. Dengan adanya sebuah informasi masyarakat dapat lebih mudah melakukan hal-hal yang di gemarinya. Keterbukaan inilah masyarakat Indonesia dapat mengenal satu sama lain. Dengan seiring perkembangan waktu di era Keterbukaan informasi ini seseorang lebih mudah mengenal data pribadi seseorang. Sebanding dengan manfaat yang diberikan yaitu keterbukaan wawasan yang lebih luas, namun ada juga ancamannya. Adanya Kejahatan Siber (cybercrime) telah menjadi ancaman diberbagai kehidupan manusia, sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya jaringan internet. Hal ini merupakan akibat dari pesatnya perkembangan teknologi informasi, (Ririn Aswandi, Putri Rofifah Nabilah, 2020). Walaupun di suatu negara akan ada perlindungan setiap data pribadinya. Namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa seorang hacker dapat membocorkan data ke public.

Di Indonesia akhir-akhir ini sedang ramai adanya seorang hacker yang melakukan penyebaran data pribadi orang-orang penting di Indonesia. Serta sekitar 1,3 miliar data simcard masyarakat Indonesian bocor (Novina Putri Bestari, CNBC Indonesia, 2022). Kebocoran data pribadi (disclosure of data) juga telah dialami beberapa pengguna e-commerce selama 2 (dua) tahun terakhir yaitu Tokopedia, Kreditplus, Reddoorz, Lazada, Bhinneka, Bukalapak (Sangojoyo et al., 2022). Hacker atau jika diartikan dalam Bahasa Indonesia peretas merupakan seseorang yang memiliki skill pemrograman mampu menerobos sistem keamanan komputer atau jaringan





komputer untuk tujuan tertentu. Seorang hacker memiliki pemahaman lanjutan tentang komputer, jaringan, pemrograman, atau perangkat keras .

Namun tidak selamanya hacker merupakan seorang yang melakukan sebuah tindakan kejahatan di dunia maya. Di dunia siber, hacker adalah sosok yang bisa meretas perangkat seperti komputer, ponsel, webcam, hingga router. Tindakan hacker yang merugikan pihak tertentu merupakan tindakan kriminal. Namun, pada kasus tertentu, hacker adalah sosok yang juga bisa menguntungkan, saat ini hacker sudah banyak digunakan jasanya untuk memberikan perlindungan pada sistem website atau aplikasi yang digunakan oleh suatu perusahaan.

Tujuan hacker adalah seringkali untuk mendapatkan akses tidak sah ke komputer, jaringan, sistem komputasi, perangkat seluler, atau sistem. Hal ini justru akan menimbulkan kerugian bagi pengguna dan termasuk dalam tindakan cyber crime. Maka dari itu, kebocoran data yang dilakukan seorang hacker membuktikan bahwa sistem keamanan data di Indonesia sangatlah lemah. Hal tersebut menyebabkan se bagaian masyarakat di Indonesia menjadi was-was atas keamanan data pribadinya. Salah satu yang menjadi sorotan adalah ketidak berdayaan badan Siber Indonesia.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjadi sorotan media dikarenakan data negara dapat dengan mudah diretas oleh seorang hacker. Walaupun secara data yang diserang oleh hacker bukanlah Badan Siber dan Sandi Negara secara langsung, namun sistem keamanan siber merupakan tanggungjawab Badan Siber dan Sandi Negara. Hal tersebut di khawatirkan dapat menyebabkan kepercayaan terhadap BSSN melemah. Karena Badan Siber dan Sandi Negara yang merupakan lembaga resmi negara yang bertugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dengan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber . Namun berdasarkan data indeks kepuasan terhadap BSSN justru meningkat dibanding tahun 2021 . berdasarkan data tahun 2021 indeks kepuasan masyarakat berada di angka 76,2 % , sedangkan pada tahun 2022 berada di angka 82,1 % (bssn.go.id ,2021). Maka dari itu peranan seorang Public relations sangat dibutuhkan dalam pengembalian citra baik dalam sebuah perusahaan di era keterbukaan informasi. Oleh karena itu topik ini sangat menarik untuk di teliti. Agar mengetahui bagaimana citra Badan Siber dan Sandi Negara pasca kejadian bocornya data public. Selain itu masyarakat juga resah dengan adanya





berita kebocoran tersebut. Maka dari itu mempertahankan citra baik dalam Badan Siber dan Sandi Negara sangatlah dibutuhkan agar masyarakat juga tidak resah, selain itu juga kepercayaan masyarakat terhadap Badan Siber dan Sandi Negara tetap terjaga.

Public Relation atau Hubungan masyarakat dapat diartikan sebuah seni yang diciptakan untuk mendapatkan pengertian publik yang baik sehingga bisa memperdalam tingkat kepercayaan publik terhadap suatu individu/organisasi. Selain pengertian di atas, humas dapat pula didefinisikan suatu proses yang secara kontinyu dari usaha manajemen untuk memperoleh kemauan baik dan pengertian dari pelanggan, pegawai dan publik yang lebih luas (Oemi, Abdurahman, 1993). Dengan ini salah satu tugasnya adalah mempertahankan citra baik sebuah instansi. Maka dari itu tugas public relation dalam mempertahankan citra baik Badan Siber dan Sandi Negara serta memperbaiki citra instansi yang terkena dampak akibat kebocoran data yang dilakukan oleh Hacker sangatlah penting untuk menciptakan kepercayaan terhadap publik. Public relations (PR) memiliki posisi yang sangat penting dalam sebuah organisasi, terutama jika organisasi tersebut sering berinteraksi dengan masyarakat luas. Hal tersebut dikarenakan public relations merupakan salah satu front liner penting dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Aktivitas public relations sehari-hari adalah menyelenggarakan komunikasi timbal balik antara Lembaga dan pihak publik yang bertujuan menciptakan saling pengertian dan dukungan bagi tercapainya tujuan tertentu, kebijakan, kegiatan produksi, demi kemajuan Lembaga atau citra positif Lembaga bersangkutan (Mukarom & Laksana, 2015).

Kajian Pustaka

The rapid development of information and communication technology has increased the opportunities for criminals to commit cybercrime (Abdelbaqi, 2016). Cybercrime has become one of the fastest-growing concerns for law enforcement agencies at the federal, state, and municipal levels (McKoy, 2021). Perkembangan teknologi yang cepat dan dinamis membuat penanganan dan pengamanannya menjadi semakin kompleks dan lebih sulit. Ketersediaan serta kemampuan SDM siber nasional memainkan peran penting dalam penanganan ancaman perang siber yang





semakin besar. Meskipun telah memiliki badan khusus yang menangani masalah keamanan siber yakni Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), kenyataannya bangsa Indonesia masih kurang SDM sibernya, baik dalam segi kuantitas dan kualitasnya Hal ini menandakan diperlukannya upaya pengembangan SDM siber nasional yang lebih besar lagi. (Christmartha et al., 2020). Adanya Kejahatan Siber (*cybercrime*) telah menjadi ancaman diberbagai kehidupan manusia, sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya jaringan internet. Hal ini merupakan akibat dari pesatnya perkembangan teknologi informasi, sehingga setiap perkembangan pada hakikatnya membawa dampak yang positif maupun negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah adanya penyalahgunaan data dan informasi pribadi (Ririn Aswandi, Putri Rofifah Nabilah, 2020). Salah satu Faktor yang mempengaruhi terjadinya kebocoran data adalah belum adanya sarana beserta aturan yang secara komprehensif mengatur tentang perlindungan data pribadi di Indonesia (Sangojoyo et al., 2022). Tidak adanya control terhadap data-data yang diciptakan oleh penduduk Indonesia maupun data yang berkaitan akan menimbulkan *Loss of integrity*, *lost of availability*, *lost of confidentiality* dan *Physical destruction*. *Loss of integrity* merupakan kondisi dimana informasi yang ada dapat terdapat kondisi informasi yang ada dapat dimodifikasi secara tidak benar, *Loss of availability* merupakan kondisi dimana system informasi penting tidak bisa diakses oleh pengguna yang seharusnya memiliki otoritas, *Loss of confidentiality* merupakan kondisi dimana informasi penting telah diakses oleh pengguna yang tidak memiliki wewenang dan *Physical destruction* merupakan kondisi dimana system informasi telah menciptakan malfungsi yang dampaknya dapat dirasakan secara fisik (Ahituv, 2009, hal. 15). Seiring perkembangan zaman, teknologi menimbulkan dampak yang besar bagi kehidupan manusia. *Development* (UNCTAD) tahun 2015, menyebutkan terdapat 2.100 kasus yang menimbulkan permasalahan terkait data pribadi milik pengguna *e-commerce* dengan jumlah mencapai 822 juta data pribadi terekam dalam kegiatan *e-commerce*, serta dikumpulkan di *marketplace*. (Nugroho et al., 2021)





Kebocoran data pribadi (disclosure of data) telah dialami beberapa pengguna e-commerce selama 2 (dua) tahun terakhir yaitu Tokopedia, Kreditplus, Reddoorz5, Lazada, Bhinneka, Bukalapak (Sangojoyo et al., 2022). Serangan pencurian data-data pribadi masih terus dilakukan secara masif, hal tersebut dapat dilihat dari data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang mengumumkan terdapat 88,4 (delapan puluh delapan koma empat) juta serangan siber yang dilancarkan sejak Januari sampai dengan April 2020 (Sangojoyo et al., 2022). Data serangan siber yang dirilis oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bersama Indonesia Honeynet Project (IHP) menunjukkan bahwa terdapat serangan siber yang berasal dari Indonesia atau dalam negeri. Sumber informasi serangan siber yang dikategorikan sebagai *Open Source Intelligent* (OSINT) tersedia di Internet dengan berbagai format. Bahkan informasinya tersebar tergantung dari pihak penyedia (Hariyadi & Fazlurrahman, 2019).

Penyebab terjadinya kebocoran data pribadi adalah kelalaian Pengguna Sistem Elektronik dan kecerdasan pelaku tindak pidana. Penyelesaian perkara sesuai dengan Undang-Undang ITE, namun aturan tersebut belum mampu memberikan efek yang besar terhadap pengguna teknologi dalam perlindungan kebocoran data pribadi. pelaku usaha yang tidak terdaftar sehingga upaya untuk menemukan pemilik barang sangat susah teridentifikasi (HB & Djaenab, 2022). *Through the National Cyber and Crypto Agency (Badan Siber dan Sandi Negara, BSSN) as the leading sector in handling national cyber problems, the Indonesian Government has taken strategic steps to safeguard the national interests and goals of the Indonesian nation and other state institutions stakeholders involved in the management of cyber security and defense. However, in practice, there are still several obstacles such as the unreadiness of regulation, quality, and quantity of human resources and technology infrastructure owned by Indonesia in dealing with any threats that can occur at any time* “Melalui Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai leading sector dalam penanganan masalah siber nasional, Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategis untuk menjaga kepentingan dan tujuan nasional bangsa Indonesia dan pemangku kepentingan lembaga negara lainnya yang terlibat. dalam pengelolaan keamanan dan pertahanan siber. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala seperti belum siapnya





regulasi, kualitas, dan kuantitas SDM dan infrastruktur teknologi yang dimiliki Indonesia dalam menghadapi setiap ancaman yang dapat terjadi sewaktu-waktu” (Candra et al., 2021). Kasus-kasus yang kian marak ini ujung-ujungnya hanya berakhir pada koordinasi antara pihak penyelenggara sistem elektronik yang sistemnya diretas, dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Siber dan Sandi Negara, tanpa adanya hasil konkret yang diketahui oleh masyarakat luas apakah sebenarnya kelanjutan dari kasus-kasus ini. Apabila kasus-kasus serupa terus muncul, tentu saja akan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (Wijaya, 2020).

Public relations (PR) memiliki posisi yang sangat penting dalam sebuah organisasi, terutama jika organisasi tersebut sering berinteraksi dengan masyarakat luas. Hal tersebut dikarenakan *public relations* merupakan salah satu *front liner* penting dalam berkomunikasi dengan masyarakat. *Public relations* menentukan kesan positif sebuah organisasi di mata masyarakat, dan berhubungan dengan masyarakat akan menentukan cara organisasi tersebut bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat. Dengan kata lain, public relations juga berperan dalam membangun hubungan, khususnya hubungan komunikasi untuk memberi tahu, memengaruhi, dan mengubah pengetahuan, sikap, dan perilaku public sarasannya. Kegiatan public relations tersebut berkaitan sangat erat dengan pembentukan opini publik dan perubahan sikap. Aktivitas public relations sehari-hari adalah menyelenggarakan komunikasi timbal balik antara Lembaga dan pihak publik yang bertujuan menciptakan saling pengertian dan dukungan bagi tercapainya tujuan tertentu, kebijakan, kegiatan produksi, demi kemajuan Lembaga atau citra positif Lembaga bersangkutan (Mukarom & Laksana, 2015).

Metode

(Sub Bab font TNR ukuran 12, Bold)

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif Library Research. penelitian kualitatif adalah sebuah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami arti dari individu atau kelompok yang melekat pada masalah sosial humaniora. Proses dari penelitian





meliputi pertanyaan, data dengan settingan peserta, analisis data secara induktif serta pembuatan interpretasi arti data yang dilakukan oleh peneliti. Laporan akhir tertulisnya memiliki struktur yang sangat fleksibel. Metode Kualitatif bergantung kepada data. Metode ini memiliki langkah – langkah yang khas dalam menganalisis data (Creswell, 2014). Pada penelitian ini permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana Strategi Humas Dalam Mempertahankan Citra Bsn Pasca Terjadinya Kebocoran Data.

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena metode ini dinilai mampu membantu peneliti dalam memahami dan mengeksplorasi masalah penelitian secara mendalam, yaitu dengan pengumpulan data, analisis data, dan penafsiran makna (Creswell, 2009).

Hasil dan Pembahasan

Ancaman Serangan Siber

Serangan siber dapat terjadi dimana saja. Dengan meningkatnya penggunaan internet memiliki resiko semakin tinggi akan terjadinya peretasan. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat hingga bulan April 2022, serangan siber di Indonesia mencapai angka 100 juta kasus (Ericha Andriyana, 2022). Yang menjadi target serangan utama adalah pencurian kekayaan intelektual dan Informasi bisnis yang bersifat rahasia. Ancaman ini akan mengancam seluruh negara di dunia baik negara maju maupun negara berkembang (Direktur Jendral Kerja Sama ASEAN, 2018).

Selama Periode Januari hingga Maret 2022, perusahaan keamanan Internet Kaspersky mendeteksi dan memblokir 11.802.558 ancaman online yang menyebar melalui internet pada computer pengguna Kaspersky security Networks (KSN) di Indonesia. secara keseluruhan 27,6 persen pengguna dalam negeri menjadi sasaran ancaman berbasis web pada periode tersebut. Angka ini meningkat 22 % dibandingkan periode tahun lalu yang sebesar 9,639.740 ancaman dan hanya menurun 2 % dari kuartal akhir yaitu pada periode Oktober hingga Desember 2021 (CNN Indonesia, 2022). Hal tersebut dikarenakan perkembangan teknologi yang cepat dan dinamis





membuat penanganan dan pengamanannya menjadi semakin kompleks dan lebih sulit (Christmartha et al., 2020).

Salah hal satu Faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kebocoran data adalah belum adanya sarana beserta aturan yang secara komprehensif untuk mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia (Sangojoyo et al., 2022).

Kepuasan masyarakat terhadap BSSN

Badan Siber dan Sandi Negara merupakan lembaga resmi negara yang bertugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dengan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber. Oleh karena itu Badan Siber dan Sandi Negara juga memerlukan kepercayaan masyarakat yang dilakukan dengan melihat tingkat kepuasan masyarakatnya. Indeks kepuasan masyarakat terhadap Badan Siber dan Sandi Negara dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Dimana nantinya indeks kepuasan masyarakat ada mempengaruhi strategi apa yang adapat diambil untuk menjaga citra baik dari Badan Siber dan Sandi Negara.

Berdasarkan tabel dapat dihitung bahwa kepuasan masyarakat terhadap Badan Siber dan Sandi Negara dengan cara jumlah total rata-rata unsur pelayanan x 0,1 x 25, maka dapat dihitung indeks surveynya adalah $3,284 \times 25 = 82,1$. Jadi pada tahun 2019 indeks kepuasan masyarakat terhadap Badan Siber dan Sandi negara adalah 82.1/100 yang menunjukkkn nilai B. Namun pada tahun setalahnya, yaitu pada tahun 2020 indeks kepuasan masyarakat mengalami penurunan setelah terjadinya kebocoran data pribadi pada beberapa e-commer. Data penurunan kepuasan masyarakat terhadap Badan Siber dan Sandi Negara pada tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut.

Berdasarkan Indeks kepuasan masyarakat terhadap Badan Siber dan Sandi Negara tahun 2020 menyatakan Indeks kepuasan masyarakat berada pada nilai 80,75/100. Nilai tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 82,1. Penurunan ini terus berlangsung pada tahun berikutnya yaitu tahun 2021.





Dari tahun 2019 – 2021 indeks kepuasan masyarakat terhadap Badan Siber dan Sandi Negara terus mengalami penurunan. Pada tahun 2021 Indeks kepuasan masyarakat terhadap Badan Siber dan Sandi Negara menunjukan Nilai 76,73/100.

Strategi Public Relation

Seorang public relations akan melaksanakan tugasnya dengan baik apabila didukung oleh strategi komunikasi yang tepat dan efektif (Hafizah, 2018). Begitu juga dalam menjaga maupun memperbaiki citra Badan Siber dan Sandi Negara. Berdasarkan data indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja Badan Siber dan Sandi Negara dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan. Walaupun, untuk data tahun 2022 belum keluar namun di khawatirkan juga akan menurun, mengingat pada bulan September tahun 2022 serangan yang dilakukan oleh Borka kembali membuat masyarakat resah akan data pribadinya. Maka dari itu dalam menjaga nama baik Badan Siber dan sandi Negara diperlukannya strategi komunikasi yang baik. Salah satunya adalah dengan menggunakan strategi komunikasi public relations (Soemirat & Ardianto, 2003):

1. *By serving the media* (pelayanan kepada media) Strategi dengan memberikan pelayanan kepada media. Sehingga Seorang public relations dituntut untuk selalu siap memberikan pelayanan kepada media sesuai yang dibutuhkan oleh media massa tersebut. Pelayanan kepada media massa ini dapat berupa menyiapkan jawaban-jawaban serta memberikan jawaban maupun informasi yang dibutuhkan oleh media massa pada saat-saat tertentu yang berhubungan dengan informasi tentang Badan Siber dan Sandi Negara. Hal tersebut sangat dibutuhkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara saat ini karena menjadi salah satu perhatian publik. Pelayanan lain yang harus diberikan oleh public relations kepada media massa adalah pelayanan untuk memberikan salinan pers (press release). Dalam segala situasi (baik itu dalam situasi yang tidak menguntungkan bagi Badan Siber dan Sandi Negara pada saat ada berbagai event tertentu), seorang public relations harus selalu siap melayani media ketika media massa tersebut membutuhkan salinan pers.
2. *By establishing a reputations for reliability* (menegakkan reputasi perusahaan agar tetap di percaya) Strategi ini dilakukan oleh seorang praktisi public relations sebagai upaya untuk





menegakkan reputasi sebuah perusahaan, dalam hal ini adalah Badan Siber dan Sandi Negara. Sehingga, Badan Sandi dan Siber Negara sebagai sebuah sitem keamanan yang berada dibidang siber tetap di percaya oleh masyarakat sebagai pelindung dari segala bentuk kejahatan siber. Dalam membangun kepercayaan masyarakat, tidak hanya bisa mengandalkan promosi atau memasang iklan di media massa. Badan Siber dan Sandi Negara harus melakukan kegiatan untuk membangun reputasi perusahaan supaya tetap dipercaya oleh masyarakat. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk membangun reputasi kepada masyarakat (Hafizah, 2018):

- a. Membuat tulisan dilaman media massa yang berisi berita maupun informasi tentang perusahaan (Badan Siber dan Sandi Negara).
 - b. Melakukan kegiatan sosial masyarakatan, salah satunya dapat dilakukan dengan mengadakan seminar terhadap masyarakat. Hal ini dapat diisi tentang pelatihan dasar tentang keamanan siber. Mulai dengan cara menjaga data dengan aman melalui penyuluhan.
 - c. Membriakan informasi terhadap masyarakat tata cara pengaduan terhadap gangguan siber kepada Badan Siber dan Sandi Negara.
 - d. Badan Siber dan Sandi Negara dapat menuliskan artikel berupa opini tentang suatu permasalahan. Hal tersebut juga harus diikuti dengan menyediakan orang orang yang memiliki kredibilitas dalam bidang tersebut. Dengan kata lain Badan Siber dan Sandi Negara menyediakan narasumber yang kredibel dalam memberikan jawaban untuk kasus kasus tertentu seperti kebocoran data.
 - e. Strategi lain yang dapat digunakan adalah dengan melakukan klarifikasi, apabila sedang mengalami suatu permasalahan. Kalarifikasi harus didukung dengan fakta fakta yang sesungguhnya.
3. By supplying good copy (memasok naskah informasi yang baik) Strategi dengan memasok naskah informasi yang baik. Naskah informasi dapat dibuat dalam bentuk artikel yang berupa opini atau pendapat tentang suatu permasalahan. Naskah informasi yang baik bisa diberikan berdasarkan data-data yang sebenarnya. Naskah bisa disertai dengan gambar atau foto. Dengan memberikan naskah yang baik yang disertai dengan pembuatan teks dan gambar atau foto yang baik, diharapkan bisa menjadi satu strategi untuk menarik perhatian massa.





Selain pengiriman naskah informasi, strategi by supplying good copy ini dapat dilakukan dengan cara pengirian news release yang baik. Tujuannya supaya release yang dikirimkan dapat dimuat dan sesuai dengan „selera“ media massa maka seorang public relations tidak harus melakukan revisi yang banyak. Dia hanya memerlukan sedikit penulisan ulang atau menyuntingnya.

4. By providing verification facilities (menyediakan fasilitas) Strategi yang dilakukan dengan kejasama yang baik dalam menyediakan bahan informasi. Yang menjadi penekanan strategi ini adalah penghargaan yang tinggi dari seorang public relations kepada media massa, termasuk pekerja media. Maksudnya seorang public relations dituntut untuk menghargai media massa serta pekerja media dengan menyediakan waktu yang tepat dan meghargaan kedatangan mereka.

Penutup

Strategi Public Relations dalam menjaga nama baik Lembaga (Badan Siber dan Sandi Negara) adalah hal yang sangat penting bagi praktisi Public Relations. Hal tersebut dikarenakan Badan Siber dan Sandi Negara saat ini sedang terkena dampak dari serangan siber yang ada di Indonesia. indeks kepuasan masyarakat terhadap Badan Siber dan Sandi Negara mengalami penurunan sejak tahun 2019 hingga 2021. Hal tersebut di khawatirkan akan terus menurun, karena pada bulan September 2022 indonesia mengalami serangan siber.

Oleh karena itu strategi public relations dalam menjaga nama baik Badan siber dan sandi negara sangat dibutuhkan, seperti By serving the media (pelayanan kepada media), *By establishing a reputations for reliability* (menegakkan reputasi perusahaan agar tetap di percaya), *By supplying good copy* (memasok naskah informasi yang baik), *By providing verification facilities* (menyediakan fasilitas.). sehingga nama baik Badan Siber dan Sandi Negara sebagai lembaga resmi negara dapat terjaga.





Daftar Pustaka

- Abdurrachman, Oemi. (1993). *Dasar-dasar Public Relations*. Bandung : Citra Adiya Bakti.
- Ahituv, N. (2009). *Modelling Cyber Security: Approaches, Methodology, Strategies*. In U. Gori. Washington DC: IOS Press.
- Abdelbaqi, M. (2016). Enacting Cybercrime Legislation in an Endeavour to Counter Cybercrime in Palestine. In *Global Journal of Comparative Law* (Vol. 5, Issue 2). <https://doi.org/10.1163/2211906X-00502003>
- Candra, A., Suhardi, S., & Persadha, P. D. (2021). Indonesia Facing the Threat of Cyber Warfare: a Strategy Analysis. *Jurnal Pertahanan: Media Informasi Ttg Kajian & Strategi Pertahanan Yang Mengedepankan Identity, Nasionalism & Integrity*, 7(3), 441. <https://doi.org/10.33172/jp.v7i3.1424>
- Christmartha, M., Gultom, R. A. G., Aritonang, S., & Pertahanan, U. (2020). Strategi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Siber Nasional Guna Mendukung Pertahanan Negara the Policy Strategy of National Cybersecurity Human Resources Development To Support the National Defense (a Case Study At the National Cyber and Crypto Ag. *Jurnal Manajemen Pertahanan*, 6(2), 85. <https://www.cnnindonesia.com/teknol>
- Hafizah, E. (2018). Strategi Public Relation Dalam Membangun Hubungan Dengan Media Massa. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 15(2), 35. <https://doi.org/10.31851/jmwe.v15i2.3598>
- Hariyadi, D., & Fazlurrahman, F. (2019). Membangun Telegrambot Untuk Crawling Malware Osint Menggunakan Raspberry Pi. *Indonesian Journal of Business Intelligence (IJUBI)*, 2(1), 18. <https://doi.org/10.21927/ijubi.v2i1.996>
- HB, B., & Djaenab. (2022). *Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Terkait Kebocoran Data Dalam Ruang Cyber Crime*. 10(April), 70–76.
- McKoy, C. (2021). Law Enforcement Officers' Reaction on Traditional Crimes to Fight Cybercrime Locally. *ABC Journal of Advanced Research*, 10(2), 159–174. <https://doi.org/10.18034/abcjar.v10i2.601>
- Mukarom, Z., & Laksana, M. W. (2015). *Manajemen Public Relation : Panduan Efektif Pengelolaan Hubungan Masyarakat* (p. 319).





- Nugroho, I. I., Pratiwi, R., & Az Zahro, S. R. (2021). Optimalisasi Penanggulangan Kebocoran Data Melalui Regulatory Blockchain Guna Mewujudkan Keamanan Siber di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 1(2), 115–129. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v1i2.53698>
- Ririn Aswandi, Putri Rofifah Nabilah, M. S. (2020). *PERLINDUNGAN DATA DAN INFORMASI PRIBADI MELALUI INDONESIAN DATA PROTECTION SYSTEM (IDPS)*. 167–190.
- Sangojoyo, B. F., Kevin, A., & Sunlaydi, D. B. (2022). Urgensi Pembaharuan Hukum Mengenai Perlindungan Data Pribadi E-Commerce di Indonesia. *Kosmik Hukum*, 22(1), 27. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v22i1.12154>
- Soemirat Soleh & Ardianto Elvinaro, 2003. *Dasar-dasar Public Relations*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Wijaya, G. (2020). Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia: Ius Constitutum Dan Ius Constituendum. *Law Review*, 19(3), 326. <https://doi.org/10.19166/lr.v19i3.2510>

